Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085

Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

PENDEKATAN COMMUNITY-BASED TOURISM DALAM MELESTARIKAN BUDAYA DAN ALAM DI NUSA TENGGARA TIMUR

[1] Elshada Sembiring, [2] Balqis Lingga Putri, [3]Anjani Laras, [4]Katriza Imania, [5]Galuh Efnol Adzan, [6]Ade Maulidya
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

[1]07011182328001@student.unsri.ac.id, [2]0701128328034@student.unsri.ac.id,
[3]07011282328038@student.unsri.ac.id, [4]katrizaimania@fisip.unsri.ac.id,
[5]galuhefnoladzan@gmail.com, [6]ademaulidya1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana pendekatan Community-Based Tourism (CBT) berkontribusi dalam pelestarian budaya dan perlindungan lingkungan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui studi literatur terhadap 20 artikel terbitan 2021-2025, penelitian ini menyoroti peran partisipasi masyarakat, kelembagaan lokal, dan dukungan kebijakan dalam pengelolaan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CBT mampu memperkuat pelestarian budaya melalui keterlibatan masyarakat serta mendukung keberlanjutan lingkungan melalui praktik konservasi. Namun, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas, dan kurangnya promosi masih menjadi hambatan. Penelitian menyimpulkan bahwa CBT efektif, tetapi membutuhkan peningkatan kapasitas masyarakat dan dukungan kebijakan yang konsisten.

***Kata Kunci**: pariwisata berbasis komunitas, pelestarian budaya, keberlanjutan lingkungan, Nusa Tenggara Timur*

Abstract

This study examines how Community-Based Tourism (CBT) contributes to preserving culture and protecting the environment in Nusa Tenggara Timur (NTT). Using a literature review of 20 articles published between 2021-2025, the study identifies the role of community participation, local institutions, and government support in tourism management. The findings show that CBT strengthens cultural preservation through community-led activities and supports environmental sustainability through conservation practices. However, limited infrastructure, low capacity, and weak promotion remain challenges. The study concludes that CBT is effective but requires stronger community skills and consistent policy support.

***Keywords**; community-Based tourism, cultural preservation, environmental sustainability, Nusa Tenggara Timur*

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism Checker No 273s
DOI : Prefix DOI : 10.8734/panorama.v1i1.1395
Copyright : Author
Publish by : Panorama

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang terus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di wilayah yang memiliki kekayaan budaya dan alam. Indonesia adalah negara yang kaya akan keindahan alam serta sumber daya alam yang melimpah dengan beribu pulau. Adapun salah satu wilayah yang terkenal akan kekayaannya seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah ini dikenal dengan keragaman etnis, tradisi ritual, tenun ikat,

rumah adat, hingga lanskap alam yang unik mulai dari pegunungan, savana, hingga perairan tropis. Namun demikian, percepatan pengembangan pariwisata di NTT sering kali berhadapan dengan persoalan keberlanjutan, terutama terkait pelestarian budaya dan kelestarian lingkungan. Kondisi ini menjadikan pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai kerangka yang relevan, karena menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pariwisata secara berkelanjutan.

Perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan yang telah disusun pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah pusat melalui UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan serta Permenpar No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya sebagai fondasi utama pengelolaan destinasi. Kebijakan daerah seperti Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) NTT juga secara eksplisit mendorong pengembangan desa wisata berbasis komunitas, penguatan kelembagaan lokal, serta perlindungan kawasan alam yang rentan.

Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa penerapan CBT di NTT memberikan dampak positif, tetapi hasilnya sangat dipengaruhi oleh kapasitas masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak. Penelitian mengenai desa wisata dan ekowisata di Alor menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui pelatihan, pendampingan, dan asistensi mampu meningkatkan keterampilan serta kesadaran masyarakat dalam mengelola ekowisata (Iskandar et al., 2022). Studi lain mengenai budaya lokal, seperti ume kbubu (rumah adat), tradisi caci, serta pelestarian tenun ikat, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan nilai budaya di tengah perkembangan pariwisata (Putra et al., 2023; Babu et al., 2024; Geo et al., 2025). Selain itu, penelitian mengenai CBT di Detusoko dan Liang Ndara mengungkap bahwa partisipasi masyarakat berkorelasi dengan kelestarian lingkungan, efektivitas pemasaran, hingga penguatan identitas budaya (Raka et al., 2023; Putra et al., 2023).

Penelitian lain menyoroti aspek berbeda, seperti perubahan perilaku sosial akibat interaksi dengan wisatawan (Wangu et al., 2021), penguatan komunikasi pariwisata sebagai strategi pengembangan destinasi premium seperti Labuan Bajo (Lada, 2024), serta pentingnya perhitungan daya dukung kawasan untuk memastikan kelestarian alam seperti di kawasan Mutis (Seo, 2023). Sementara itu, studi tentang desa wisata Fatukoto menunjukkan bahwa pembentukan pokdarwis, pelatihan *homestay*, hingga penyusunan regulasi kebersihan dapat meningkatkan kesiapan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas (Nugraha, 2021). Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menggarisbawahi bahwa potensi budaya dan alam di NTT sangat besar, namun implementasi CBT sering terhambat oleh keterbatasan SDM, kurangnya promosi, minimnya fasilitas, serta ketergantungan pada bantuan pemerintah atau organisasi pendamping (Jocom & Kameo, 2024; Bahri & Abdilah, 2022).

Sebagian besar penelitian hanya meneliti satu desa atau satu aspek tertentu seperti budaya, ekonomi, atau fasilitas, tanpa mengkaji bagaimana CBT berperan secara simultan dalam menjaga pelestarian budaya dan kelestarian alam pada waktu yang bersamaan, sehingga dari penelitian-penelitian sebelumnya masih menyisakan gap penting. Selain itu, beberapa penelitian lebih menekankan pada identifikasi potensi dan tantangan operasional, tetapi belum mengintegrasikan temuan tersebut dengan konteks kebijakan pariwisata berkelanjutan di tingkat daerah. Padahal, isu integrasi budaya dan lingkungan menjadi semakin penting seiring meningkatnya tekanan pariwisata terhadap kedua sektor tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian komprehensif yang mengkaji peran CBT sebagai pendekatan strategis untuk melestarikan budaya sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, muncul permasalahan utama: sejauh mana pendekatan *Community Based Tourism* mampu menjadi instrumen efektif dalam melestarikan budaya dan alam di wilayah yang kaya tradisi seperti Nusa Tenggara Timur? Bagaimana peran masyarakat, kapasitas lokal, serta dukungan kebijakan dalam mendukung keberlanjutan melalui

penerapan CBT? Pertanyaan ini penting dijawab agar pengembangan pariwisata di NTT tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pelestarian nilai budaya dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan *Community Based Tourism* dalam melestarikan budaya dan alam di Nusa Tenggara Timur, serta mengidentifikasi peran masyarakat, faktor pendukung, hambatan, dan kontribusi CBT terhadap keberlanjutan pariwisata di daerah tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dengan menganalisis 20 artikel ilmiah terkait *Community Based Tourism* (CBT), pelestarian budaya, dan pengelolaan lingkungan di Nusa Tenggara Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran jurnal nasional yang terindeks melalui *Google Scholar* dengan tahun publikasi 2021-2025. Kriteria dalam pemilihan artikel meliputi, penelitian yang membahas penerapan CBT atau pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata di NTT dan penelitian yang berfokus pada budaya lokal, ekowisata, atau keberlanjutan lingkungan di NTT.

Analisis data dilakukan melalui teknik sintesis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi pola, tema, keterkaitan konsep, serta perbedaan temuan antarpenelitian. Setiap jurnal direview berdasarkan fokus penelitian, hasil dan kesimpulan penelitian serta relevansinya dengan penerapan CBT. Hasil sintesis ini kemudian digunakan untuk memetakan *state of the art*, menemukan gap penelitian, serta menyusun kesimpulan mengenai efektivitas pendekatan *Community Based Tourism* dalam pelestarian budaya dan alam di Nusa Tenggara Timur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas *Community Based Tourism* (CBT) dalam Melestarikan Budaya dan Alam

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa penerapan *Community Based Tourism* (CBT) di berbagai destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur terbukti memainkan peranan penting dalam upaya pelestarian budaya lokal dan perlindungan lingkungan alam. Berbagai penelitian terbaru menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas mendorong terciptanya keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keberlanjutan sumber daya. Menurut Hidayat & Dzulkarnain, (2024), pendekatan CBT mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi melalui pembagian tanggung jawab dalam menjaga kebersihan kawasan dan pengaturan aktivitas wisata, sehingga tekanan kerusakan lingkungan dapat ditekan secara signifikan. Temuan tersebut diperkuat oleh Seo (2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan daya dukung kawasan melalui pembatasan kunjungan dan pengawasan komunitas berhasil menjaga kualitas ekosistem dan mencegah eksploitasi berlebihan di sejumlah destinasi wisata alam di NTT.

Sejalan dengan aspek lingkungan, pelestarian budaya juga menjadi dampak positif utama dari penerapan CBT. Manteiro (2023) mencatat bahwa pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan atraksi budaya serta produksi kerajinan tradisional, seperti kain tenun ikat, tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat motivasi masyarakat untuk mempertahankan nilai budaya dan adat yang sebelumnya mengalami penurunan praktik. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan wisatawan dapat menjadi katalisator kebangkitan budaya apabila pengelolaannya dilakukan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat lokal. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Geo et al. (2025) yang menemukan bahwa kontrol masyarakat terhadap narasi budaya dan model pelayanan wisata membuat pelestarian tradisi tetap autentik dan tidak terdistorsi oleh komersialisasi pariwisata massal.

Lebih lanjut, efektivitas CBT dalam konteks pelestarian budaya dan lingkungan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan keberadaan kelembagaan lokal yang

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

berfungsi secara optimal. Studi Jocom dan Kameo (2024) menunjukkan bahwa desa wisata yang memiliki kelembagaan kuat seperti Pokdarwis dan BUMDes pariwisata cenderung memiliki tata kelola yang lebih baik, distribusi pendapatan yang lebih merata, serta sistem konservasi yang lebih stabil dibandingkan destinasi yang belum memiliki struktur kelembagaan yang solid. Namun demikian, beberapa studi lain menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Bahri dan Abdilah (2022) mencatat bahwa efektivitas CBT dapat terhambat apabila infrastruktur pariwisata tidak memadai dan tingkat kompetensi masyarakat dalam pengelolaan wisata masih rendah, sehingga manfaat pelestarian yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai.

Secara keseluruhan, literatur 2021–2025 menunjukkan kesimpulan konsisten bahwa CBT berpotensi menjadi instrumen efektif dalam melestarikan budaya dan lingkungan di NTT, namun efektivitas tersebut bersifat bersyarat. Tingkat keberhasilan sangat bergantung pada sinergi antara partisipasi masyarakat, kapasitas kelembagaan, dan dukungan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, meskipun CBT telah memberikan dampak positif terhadap pelestarian budaya dan konservasi lingkungan, tantangan implementasi masih perlu mendapat perhatian agar keberlanjutan pengembangan pariwisata daerah dapat tercapai secara optimal.

Peran Masyarakat dalam Penerapan *Community Based Tourism* (CBT)

Partisipasi masyarakat lokal muncul sebagai komponen kunci dalam keberhasilan penerapan pendekatan CBT di wilayah pedesaan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Neolaka et al. (2024) pada Desa Fatukoto, Kabupaten Timor Tengah Sekatan, ditemukan bahwa terdapat partisipasi aktif masyarakat, kebanggaan terhadap budaya lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menjadi faktor utama dalam pengembangan CBT._Pada penelitian Neolaka et al. (2024) juga memberikan akses konkret terhadap bagaimana masyarakat bukan hanya sebagai objek wisata, tetapi sebagai aktor yang menjalankan dan mengelola destinasi melalui kegiatannya sendiri. Dalam konteks desa penyangga kawasan wisata, penelitian Jocom dan Kameo (2024) pada Desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, menggambarkan bahwa masyarakat berhasil melakukan transformasi dari mata pencaharian utama agraris ke jasa pariwisata *homestay*. Mereka mengambil peran sebagai pemilik, pengelola, dan pemandu wisatawan secara mandiri. Transformasi ini menegaskan bahwa ketika masyarakat diberdayakan, mereka akan menanggung dan mengelola aspek budaya, wisata dan lingkungan dengan kepemilikan lokal.

Namun, tidak semua partisipasi masyarakat berada pada level yang optimal. Sebuah studi oleh Elim & Mba (2021) menunjukkan bahwa walaupun masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata di Provinsi NTT, tingkat partisipasi masih terbatas pada "tokenism" yaitu masyarakat diundang untuk ikut, tetapi belum memiliki peran pengambilan keputusan penuh atau akses pelatihan memadai. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat akan lebih bermakna bila mereka dilibatkan dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi destinasi.Lebih lanjut, peran masyarakat lokal juga berkaitan erat dengan pengelolaan budaya dan lingkungan. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan di Fatukoto, Neolaka et al. (2024) mencatat bahwa ketika masyarakat memiliki rasa bangga terhadap budaya sendiri dan mengambil bagian aktif dalam pengelolaan destinasi, maka pelestarian budaya dan lingkungan cenderung lebih berhasil. Kebanggaan terhadap budaya lokal, dan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal menjadi indikator bahwa masyarakat memahami nilai dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan warisan budaya.

Secara teoritis, partisipasi masyarakat bukan hanya soal keterlibatan tetapi pemberdayaan dimana masyarakat harus memiliki kapasitas, kontrol dan manfaat yang adil. Dalam implementasi di NTT, masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan, membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis), dan memiliki kelembagaan lokal yang aktif, menunjukkan performa pengelolaan yang lebih baik. Hal ini terlihat pada desa-desa yang dikelola masyarakat secara kolektif, bukan oleh pihak eksternal. Sebaliknya, ketika pelatihan dan pendampingan tidak mencukupi atau

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

masyarakat hanya menjadi 'penerima' alih-pengelolaan, maka potensi partisipasi ini tidak maksimal. Dengan demikian, peran masyarakat dalam penerapan CBT sangat strategis tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai pemegang kendali utama destinasi. Keberhasilan CBT dalam pelestarian budaya dan alam di NTT sangat bergantung pada seberapa jauh masyarakat terlibat secara aktif dan memiliki kapasitas untuk mengelola destinasi mereka sendiri.

Kapasitas Lokal dan Penguatan Kelembagaan

Penguatan kapasitas lokal dan kelembagaan menjadi salah satu pijakan penting dalam implementasi model *Community Based Tourism* (CBT) agar dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam banyak studi, kapasitas lokal diartikan sebagai kemampuan masyarakat atau organisasi lokal seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis) atau badan usaha milik desa (BUMDes) melakukan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi destinasi wisata secara efektif. Sebagai contoh, Danau Toba di Sumatera Utara menunjukkan bahwa strategi manajemen sumber daya manusia (HRM) yang terstruktur dan terus-menerus dilaksanakan menjadi faktor kunci. Yudhistira & Daryana (2024) menemukan bahwa meskipun potensi wisata besar, pengelolaan masih bersifat informal dan sangat bergantung pada dukungan eksternal; training yang bersifat kontekstual, lembaga yang aktif, dan kolaborasi multisektor menjadi pembeda antara destinasi yang berhasil dan yang stagnan. Dalam konteks Indonesia lebih luas, penelitian Mauliyanti et al. (2024) juga menegaskan bahwa keterlibatan komunitas sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pengelolaan membutuhkan kelembagaan lokal yang kuat sebagai mediator antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Model pariwisata berbasis komunitas yang berhasil menyebutkan adanya kelembagaan lokal yang memiliki peranan formal, regulasi internal, dan mekanisme evaluasi rutin.

Khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kaya budaya dan alam namun juga memiliki tantangan geografis dan infrastruktur kapasitas lokal menjadi sangat krusial. Kelembagaan lokal yang efektif memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga pengambil keputusan dan pengelola destinasi wisata. Hal ini memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek, bukan objek, dari pariwisata. Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa desa-wisata yang memiliki kelembagaan lokal (Pokdarwis, BUMDes) yang aktif mampu merespon perubahan pasar, melakukan inovasi produk wisata budaya atau alam, dan menjaga kualitas layanan. Namun, terdapat hambatan. Banyak kelembagaan lokal yang masih bersifat informal, kurang mendapat pembinaan sistematis, dan kurang memiliki akses ke pelatihan lanjutan maupun pembiayaan. Sebagai contoh, pada penelitian di desa wisata di Jawa Barat tepatnya di Desa Cimande ditemukan bahwa meskipun masyarakat memiliki kearifan lokal yang kaya, tetapi keterbatasan dalam manajemen bisnis, pemasaran digital, dan akses modal masih menghambat penguatan kelembagaan lokal secara optimal. Ishak (2024) menyebutkan MSMEs dan Pokdarwis di Desa Cimande masih terbatas dalam hal inovasi produk, legalitas usaha dan pemasaran digital dan menyarankan pelatihan berkelanjutan serta jaringan kolaboratif dengan pihak luar. Lebih jauh, kolaborasi antara lembaga lokal dengan pemerintah dan sektor swasta seringkali menjadi pembeda utama dalam keberhasilan penguatan kelembagaan.

Dengan demikian, penguatan kapasitas lokal dan kelembagaan merupakan pilar strategis dalam model CBT, tanpa masyarakat lokal yang memiliki kemampuan teknis, kelembagaan yang jelas, dan hubungan kemitraan yang baik, potensi pelestarian budaya dan alam melalui pariwisata hanya akan berjalan setengah-jalan. Oleh karena itu, agenda kebijakan dan praktik di NTT harus menitikberatkan pada pembinaan kelembagaan lokal secara terstruktur, pelatihan kapabilitas masyarakat, dan pengembangan mekanisme kemitraan yang berkelanjutan.

Peran dan Dukungan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah pada tingkat nasional maupun daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung penerapan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pendekatan

pengembangan pariwisata yang berbasis pada pemberdayaan komunitas. Implementasi CBT membutuhkan dukungan regulasi, fasilitasi teknis, serta komitmen kolaboratif antar-pemangku kepentingan agar pengelolaan destinasi wisata dapat berjalan efektif. Utami et al. (2022) menjelaskan bahwa pemerintah harus berfungsi sebagai fasilitator dan regulator yang menciptakan lingkungan kelembagaan yang kondusif untuk penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas. Selain itu, Prayoga & Wahyono (2024) dalam penelitiannya mengenai standar pariwisata berbasis komunitas menegaskan bahwa penyusunan regulasi dan pedoman operasional mulai dari pengaturan daya dukung kawasan, aturan kebersihan, hingga batasan jumlah kunjungan berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengelolaan destinasi dan upaya pelestarian lingkungan. Kebijakan yang jelas dan terstruktur memberi legitimasi kelembagaan lokal seperti Pokdarwis dan BUMDes untuk beroperasi lebih efektif dalam menyusun program wisata dan melakukan kerja sama antarsektor.

Di sisi lain, dukungan pemerintah bukan hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga penyediaan infrastruktur, pelatihan dan pendampingan, serta promosi destinasi. Hidayat & Dzulkarnain (2024) menunjukkan bahwa lemahnya penyediaan infrastruktur dasar pariwisata serta keterbatasan anggaran sering menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan pengembangan CBT, terutama di wilayah yang secara geografis dan administratif berada dalam kategori tertinggal, seperti banyak kawasan pedesaan di Indonesia Timur. Dalam kasus tersebut, keberadaan regulasi tanpa dukungan implementatif yang memadai masih belum cukup mendorong peningkatan kualitas pengelolaan destinasi. Selanjutnya, Khusnawati & Wahyudi (2023) menekankan bahwa meskipun dukungan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan desa wisata sudah tersedia, pelaksanaan kebijakan masih dihadapkan pada lemahnya koordinasi lintas sektor dan belum optimalnya monitoring serta evaluasi program sehingga dampaknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat lokal. Kondisi tersebut menyebabkan keberlanjutan pengelolaan wisata berbasis komunitas masih sangat bergantung pada inisiatif dan kapasitas lokal tanpa sistem pendukung yang kuat.

Faktor Pendukung Keberhasilan CBT

Analisis literatur dan studi kasus di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan bahwa keberhasilan *Community Based Tourism* (CBT) ditentukan oleh sekumpulan faktor yang saling melengkapi yaitu, partisipasi aktif komunitas, kelembagaan lokal yang fungsional, peningkatan kapasitas, dukungan teknis dan pembiayaan, serta jaringan kolaborasi multipihak untuk pemasaran dan pengembangan produk. Pada banyak kasus di NTT, ketika faktor-faktor ini hadir secara bersamaan, inisiatif CBT mampu menghasilkan dampak ganda sehingga memperkuat identitas budaya lokal sekaligus menjaga kualitas lingkungan alam.

Studi tentang Desa Fatukoto Neolaka et al. (2024) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang nyata, seperti keterlibatan dalam perencanaan, operasi *homestay*, dan pengelolaan atraksi menjadi pemicu utama keberlanjutan program. Penelitian tersebut menemukan bahwa selain aspek ekonomi, rasa bangga masyarakat terhadap budaya lokal dan pelibatan mereka dalam pengambilan keputusan berkontribusi pada praktik pelestarian budaya yang lebih stabil.

Kemampuan teknis masyarakat, termasuk manajemen usaha, pemasaran digital, dan pelayanan *homestay* muncul sebagai faktor yang membedakan desa yang “bertahan” dan yang “stagnan”. Studi kasus di beberapa desa wisata NTT menunjukkan bahwa desa yang menerima program pelatihan tentang *hospitality*, pemasaran digital, dan pengembangan produk wisata berhasil meningkatkan jumlah kunjungan dan pendapatan lokal, sebaliknya, desa yang belum mendapatkan pelatihan intensif mengalami keterbatasan dalam memonetisasi potensi budaya/alamnya.

Dukungan pembiayaan dan akses modal juga sering disebut sebagai faktor penentu. Beberapa studi di NTT menyebutkan bahwa keterbatasan modal menghambat perbaikan fasilitas

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

homestay, produksi kerajinan tradisional, dan pemasaran digital padahal investasi kecil pada infrastruktur dasar dan materi promosi sering menghasilkan kenaikan kunjungan yang nyata. Terakhir, jejaring kolaboratif misalnya dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, NGO, dan pelaku sektor swasta dapat meningkatkan kapasitas riset, promosi, dan akses pasar. Contohnya kolaborasi akademik-komunitas terlihat pada beberapa studi pengembangan produk di NTT, di mana perguruan tinggi memberikan pendampingan desain produk tenun, pelatihan kualitas layanan, dan pembuatan materi promosi digital, intervensi semacam ini mempercepat profesionalisasi pengelolaan desa wisata.

Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi CBT

Meskipun model pariwisata berbasis komunitas menawarkan peluang signifikan untuk pelestarian budaya dan lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, implementasi di lapangan menghadapi beragam hambatan yang menghambat potensi tersebut. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap sumber daya yang memadai. Sebagai contoh, dalam studi pengabdian masyarakat di delapan desa wisata wilayah Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), 65,6% responden menyatakan jaringan internet tidak stabil sebagai kendala, 76,3% menyebut kurangnya kemampuan pengemasan produk wisata berbasis kearifan lokal sebagai hambatan, dan 68 % responden melihat bahwa peran pemerintah daerah dalam menyediakan sarana-prasarana umum masih belum maksimal (Ndiung et al., 2024). Hambatan semacam ini membatasi kemampuan komunitas untuk melakukan promosi digital, pengembangan produk, ataupun meningkatkan daya tarik pasar wisata.

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal juga menjadi tantangan yang signifikan. Dalam konteks desa wisata di NTT, penelitian terhadap Desa Wae Rebo di Kabupaten Manggarai Tengah menunjukkan bahwa meskipun potensi kearifan lokal sangat tinggi, pengelolaan wisata masih terhambat oleh fasilitas dan prasarana yang belum memadai, aksesibilitas yang sulit, serta kurangnya pelatihan manajemen destinasi dan pemasaran wisata (Lanur & Martini, 2015). Kondisi ini mengindikasikan bahwa keunggulan budaya atau alam saja tidak cukup tanpa penguatan kapabilitas lokal dan infrastruktur pendukung.

Selain itu, tantangan lain yang sering muncul adalah ketergantungan terhadap bantuan eksternal dan kurangnya kemandirian pengelolaan lokal. Ketika komunitas wisata bergantung pada program pemerintah atau organisasi non-pemerintah sebagai sumber utama pendanaan atau pelatihan, maka keberlanjutan jangka panjang bisa terancam ketika dukungan tersebut berhenti. Meskipun belum banyak studi kuantitatif yang secara spesifik mengukur dampak ketergantungan tersebut di NTT, banyak laporan praktik lapangan yang menyebut bahwa desa wisata stagnan ketika tidak dibarengi penguatan kelembagaan lokal secara mandiri.

Promosi destinasi dan pemasaran yang belum optimal juga menjadi hambatan penting. Desa-wisata di wilayah NTT yang memiliki potensi alam dan budaya besar tetap mengalami kunjungan wisatawan yang rendah karena keterbatasan promosi dan pemasaran digital. Sebagai contoh dalam studi Ndiung et al. (2024) jaringan internet yang tidak stabil dan kurangnya kemasan produk menjadi bagian terbanyak dari faktor penghambat. Hal ini berdampak langsung pada tingkat kunjungan, pendapatan masyarakat, dan motivasi untuk terus mengembangkan destinasi.

Terakhir, adanya perubahan kondisi eksternal seperti perubahan selera wisatawan, pandemi global, atau tekanan terhadap lingkungan alam (misal *over-tourism*, kerusakan ekosistem) juga menambah kompleksitas pengelolaan CBT. Desa-wisata yang belum memiliki mekanisme mitigasi risiko dan pemantauan lingkungan cenderung menghadapi dilema antara membuka akses wisata untuk ekonomi dan menjaga kualitas lingkungan jangka panjang.

Kontribusi CBT terhadap Pelestarian Budaya dan Lingkungan

Penerapan *Community Based Tourism* (CBT) terbukti memberikan kontribusi penting dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal dan kelestarian lingkungan, terutama pada kawasan

wisata berbasis komunitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Model CBT mendorong masyarakat lokal berperan aktif sebagai pengelola utama destinasi sehingga orientasi pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan nilai budaya, kearifan lokal, dan perlindungan lingkungan sebagai prioritas. Fitriani (2023) menjelaskan bahwa CBT berperan sebagai mekanisme sosial yang menghubungkan fungsi perlindungan budaya dengan pemberdayaan ekonomi, sehingga praktik budaya tetap terjaga dalam aktivitas pariwisata.

Studi Neolaka et al. (2024) mengenai CBT di Desa Fatukoto, Kabupaten Timor Tengah Selatan, menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengelolaan atraksi wisata budaya memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga identitas budaya lokal. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa partisipasi aktif komunitas termasuk pelestarian ritual adat, tarian tradisional, serta pengelolaan *homestay* berbasis rumah adat menjadi faktor yang mendukung keberlanjutan budaya melalui pariwisata. Selain itu, penelitian Manteiro (2023) menegaskan bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di NTT telah menjadi instrumen strategis dalam menjaga dan menghidupkan kembali tradisi lokal, seni, dan kerajinan. Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa CBT menciptakan ruang yang memungkinkan regenerasi praktik budaya sekaligus peningkatan kesejahteraan.

Kontribusi CBT terhadap perlindungan lingkungan juga tampak jelas dalam berbagai destinasi di NTT. Dalam studi terkait strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pantai Nemberala, Kabupaten Rote Ndao, ditemukan bahwa komunitas lokal menerapkan kebijakan internal berbasis konservasi, seperti pembatasan akses wisata pada zona rentan, edukasi lingkungan bagi wisatawan, dan penegakan larangan pembuangan sampah di area wisata. Mekanisme ini menunjukkan bahwa CBT tidak hanya menjaga kualitas ekosistem, tetapi juga meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat dan wisatawan.

Selain itu, pendekatan konservasi berbasis masyarakat juga diterapkan di destinasi wisata alam dan budaya seperti Egon Buluk dan Detusoko, dimana pengelola lokal menetapkan aturan yang membatasi aktivitas wisata berisiko terhadap kerusakan alam, serta mewajibkan briefing konservasi sebelum trekking. Model ini memperlihatkan bahwa upaya pelestarian alam dilakukan melalui sistem kontrol daya dukung berbasis adat, bukan regulasi formal semata. Kontribusi CBT terhadap pelestarian budaya dan lingkungan juga terlihat melalui pengembangan ekonomi kreatif lokal, seperti produksi tenun ikat, kuliner tradisional, dan kerajinan berbasis bahan alam. Praktik-praktik ini tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tetapi juga memperkuat nilai budaya dan memotivasi generasi muda untuk meneruskan tradisi lokal (Neolaka et al., 2024). Melalui temuan-temuan tersebut, dapat dilihat bahwa CBT menjadi strategi efektif untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian budaya, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal di NTT.

D. SIMPULAN

Penerapan Community Based Tourism (CBT) di Nusa Tenggara Timur (NTT), dapat disimpulkan bahwa CBT merupakan pendekatan strategis yang efektif untuk melestarikan budaya dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan destinasi terbukti meningkatkan kesadaran kolektif mengenai nilai budaya lokal, menjaga kualitas ekosistem, serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih adil bagi komunitas. Pelestarian budaya melalui ritual adat, kerajinan tradisional, dan penguatan identitas lokal menjadi lebih kokoh ketika masyarakat memiliki kuasa penuh dalam merancang dan menjalankan aktivitas pariwisata. Di sisi lain, penerapan prinsip konservasi berbasis komunitas, seperti pembatasan kunjungan dan pengawasan lokal, mampu menekan potensi kerusakan lingkungan di berbagai destinasi alam NTT.

Namun demikian, efektivitas CBT tidak bersifat otomatis. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kapasitas lokal, kekuatan kelembagaan masyarakat seperti Pokdarwis dan BUMDes, serta dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah. Tantangan seperti keterbatasan

infrastruktur, minimnya pelatihan, rendahnya pemasaran digital, serta ketergantungan terhadap bantuan eksternal masih menjadi hambatan dalam implementasi CBT secara optimal. Meskipun demikian, bila faktor partisipasi, kapasitas lokal, dan regulasi saling mendukung, CBT dapat menjadi instrumen unggul dalam menciptakan pariwisata yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat lokal.

E. SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat penerapan CBT di NTT maupun wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan yang berkelanjutan terkait manajemen wisata, hospitality, pemasaran digital, dan konservasi lingkungan. Program pelatihan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta lembaga pendamping. Kedua, pemerintah perlu memperkuat dukungan kebijakan dengan menyediakan infrastruktur dasar pariwisata, memper jelas regulasi pengelolaan destinasi, serta mengembangkan mekanisme monitoring yang terukur agar pengelolaan pariwisata tidak keluar dari prinsip keberlanjutan.

Ketiga, kelembagaan lokal seperti Pokdarwis dan BUMDes perlu diperkuat secara administratif, legal, dan finansial agar mampu mengambil keputusan secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal. Kolaborasi multipihak baik dengan sektor swasta, NGO, maupun komunitas kreatif juga perlu diperluas untuk memperkuat promosi destinasi dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk budaya dan ekonomi lokal. Terakhir, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali aspek implementatif CBT secara lebih mendalam di desa-desa yang menghadapi stagnasi, serta mengkaji model kolaborasi yang paling efektif untuk meningkatkan keseimbangan antara konservasi alam, pelestarian budaya, dan keuntungan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anshory, B. J., & Nangoy, O. M. (2023, March). Peran Budaya Handcraft Masyarakat NTT Dalam Mengangkat Nilai Kebaharuan Desain Yang Berdampak Terhadap Ekonomi Kreatif. In *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* (Vol. 6, pp. 118-125).

Babu, M. A., Wulandari, L. W., & Susanto, D. R. (2024). Implementasi Kearifan Lokal Untuk Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*, *7*(3), 34-42.

Bahri, A. S., & Abdilah, F. (2022). Potensi sumber daya manusia bidang pariwisata di kawasan strategis pariwisata nasional Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. *Destinesia: Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata*, *3*(2), 84-92.

Boimau, P., Bani, A., Nubatonis, J., & Astawa, N. D. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Nusa Tenggara Timur Untuk Mendukung Industri Pariwisata Super Premium International Labuan Bajo di Era New Normal Life. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(1), 32-38.

Elim, Y. V., & Mba, D. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Pariwisata Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2019. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, *9*(1), 23. https://doi.org/10.24843/jdepar.2021.v09.i01.p03

Frans, F., & Djunaid, I. S. (2025). Strategi Pengembangan untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Pantai Nemberala Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*(7), 8273-8280.

Geo, G., Gultom, A. F., & Widijatmoko, E. K. (2025). Upaya Mayarakat Lokal dalam Melestarikan Budaya Kain Tenun Kemumu Desa Rendah Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten

Manggarai Melalui Pendekatan Etnografi. *WANUA TO MACCA: Journal of Educational Studies*, *2*(1).

Hidayat, M. A., & Dzulkarnain, I. (2024). Pengembangan Infrastruktur Community Based Tourism(CBT) Wisata Halal Berbasis Ekowisata Bahari di Pulau Gili Labak, Madura. *Abdimas Pariwisata*, *5*(1), 42–49. https://doi.org/10.36276/jap.v5i1.484P

Ishak, R. P. (2024). Capacity Building and Community Empowerment Strategies Based on Local Wisdom: A Case Study of Cimande Village. *TRJ Tourism Research Journal*, *8*(2), 239. https://doi.org/10.30647/trj.v8i2.265

Iskandar, A. M., Kasim, H., Akhiruddin, A., Jalal, J., & Azhim, M. I. (2022). Ekowisata Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Masyarakat Pesisir Alor Nusa Tenggara Timur). *Phinisi Integration Review*, *5*(3), 650.

Jocom, H., & Kameo, D. D. (2024). Community Based Tourism: Transformasi Masyarakat Desa Penyangga Taman Nasional Kelimutu Flores. *Jurnal Pariwisata Tawangmangu*, *2*(2), 116-124.

Khusnawati, M. A., & Wahyudi, A. (2023). Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) dalam Pengelolaan Desa Wisata Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat. *Tourism Scientific Journal*, *9*(1), 28–39. https://doi.org/10.32659/tsj.v9i1.303

Lada, H. L. L. (2024). Komunikasi Pariwisata dalam Pengembangan Destinasi Wisata Premium Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Labuan Bajo. *Bulletin of Community Engagement*, *4*(3), 57-67.

Lanur, V. S. C., & Martini, E. (2015). Pengembangan Desa Wisata Wae Rebo Berdasarkan Kearifan Lokal. *Jurnal Planesa*, *6*(2), 60–67. https://media.neliti.com/media/publications/213040-pengembangan-desa-wisata-wae-rebo-berdas.pdf

Manteiro, M. C. . (2023). PENGEMBANGAN PARAWISATA (COMMUNITY BASED TOURISM) SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, *8*(2), 190–203.

Mauliyanti, A., Sujianto, A. E., & Nurrohman, D. (2024). Local Community-Based Sustainable Tourism Development Towards Community Welfare. *Proceeding of International Conference on Education, Society and Humanity Vol.*, *2*(2). https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/icesh/article/viewFile/10463/4165?utm

Ndiung, S., Sutam, I., & Menggo, S. (2024). Mengeksplorasi Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Desa Wisata di Wilayah Manggarai, NTT. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *8*(3), 918–929. https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v8i3.18798

Neolaka, G. O. O., Toda, H., Rene, M. O., & Sayrani, L. P. (2024). Dimensi Sosial dalam Community Based Tourism (CBT) (Studi Pada Destinasi Wisata Nefo Kaenka , Desa Fatukoto Kabupaten TTS). *Dharma Ekonomi*, *31*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.59725/de.v31i1.225

Niman, E. M., Tapung, M. M., Ntelok, Z. R. E., & Darong, H. C. (2023). Kearifan lokal dan upaya pelestarian lingkungan air: Studi etnografi masyarakat adat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, *13*(1), 1-16.

Nugraha, Y. E. (2021). Sosialisasi Sadar Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Fatukoto. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, *2*(1), 14-22.

Pareira, R. A. E., & Sawu, M. R. (2025). Kewirausahaan Pariwisata sebagai Motor Penggerak Desa Wisata: Studi Kasus Desa Wisata Egon Buluk, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Projemen UNIPA*, *12*(2), 204-213.

Prayoga, F., & Wahyono, H. (2024). Penilaian Standar Pariwisata Berbasis Komunitas (CBT) dalam Pengembangan Wisata Puncak Pagerbatu, Kota Banjar. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, *8*(3), 226–243. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2024.8.3.226-243

Putra, D. P. K. E., Trimandala, N. A., & Panca, W. A. (2023). Peran partisipasi masyarakat dan

lingkungan alam pada pengaruh ancillary service terhadap pemasaran wisata di Desa Liang Ndara, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, *6*(2), 211-226.

Raka, Y. R. W., Hartono, S., & Puspaningtyas, A. (2023). Pengembangan Wisata Budaya Berbasis Masyarakat di Desa Detusoko Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, *1*(4), 526-532.

Sawu, M. R., Tandafatu, N. K., & Poa, D. S. M. (2025). Praktik Pariwisata Berbasis Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Pedesaan: Studi Kasus Taman Wisata Alam Egon, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Tamasya: Jurnal Pariwisata Indonesia*, *2*(2), 26-36.

Seo, N. A. (2023). Ekowisata dan Daya Dukung Cagar Alam Mutis Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata*, *3*(2), 41-54.

Suhartapa, S., Devani, L. L. A., & Priyanto, S. E. (2025). POTENSI BUDAYA LOKAL DALAM MEMPENGARUHI MINAT KUNJUNG WISATAWAN NUSANTARA KE WAE REBO NUSA TENGGARA TIMUR. *Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah*, *19*(1), 1-11.

Tandafatu, N. K. (2025). Penguatan Ketahanan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Hijau Dalam Pengembangan Pariwisata Pedesaan di Desa Wisata Egon Buluk, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Projemen UNIPA*, *12*(2), 182-203.

Utami, V. Y., Yusuf, S. Y. M., & Mahsuri, J. (2022). TheJournalish : Social and Government COMMUNITY BASED TOURISM UPAYA. *TheJournalish: Social and Government*, *3*(3), 218–226. https://doi.org/https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.286 PENERAPAN

Wangu, M., Nonci, N., & Maidin, M. R. (2021). Perubahan Perilaku Pada Masyarakat Di Sekitar Industri Pariwisata Di Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, *1*(1), 33-45.

Yudhistira, P., & Daryana, A. P. (2024). Human Resource Management Strategy in Community-Based Tourism Business in Lake Toba Area. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, *6*(2), 154–160. https://doi.org/https://doi.org/10.35899/biej.v6i2.950